

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan kewenangan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah senantiasa dapat menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, dan efektivitas, serta selalu menegakkan supremasi hukum. Hal ini diperlukan secara hukum. Penting juga agar penyelenggara memiliki komitmen dan keinginan yang kuat untuk menjalankan dan menjalankan kewajiban dan fungsi pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terwujudnya nilai-nilai ideal tersebut tentunya berkorelasi positif dengan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta secara umum memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dan nasional dalam arah dan konsep kebijakan pembangunan nasional Nawachita. bisa.

Sebagai akibat dari perubahan sosial dan hukum yang begitu besar dan cepat dalam masyarakat, pertumbuhan masyarakat kelas menengah m.enjadi semakin penting, terutama sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan banyak orang, termasuk: Sudah menjadi. Meningkatnya isu hak asasi manusia, demokratisasi, tata pemerintahan yang baik, penegakan hukum, dll. Selain itu, dinamika sosial yang terjadi di masyarakat telah menciptakan berbagai bentuk perubahan arah dan tujuan, serta visi dan misi hukum. dan sektor hak asasi manusia, hingga solusi sosial modern dan masalah terkait. Menyesuaikan kompleksitas, terutama bagaimana Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di

Surabaya, Jawa Timur, mengkoordinir arah dan gerakan reformasi dan transformasi global, khususnya penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai sistem perencanaan koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut. Oleh karena itu, suatu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, supaya mampu mengelola instansi tersebut dengan baik agar dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif, maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya salah satu alat tersebut adalah laporan kinerja progress penyerapan anggaran pada AHU Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur.

Anggaran adalah rencana keuangan masa depan yang mencakup ekspektasi manajemen untuk pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lainnya dalam satu tahun. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana, biaya rencana, dan berapa banyak dan berapa banyak uang yang dapat dikumpulkan untuk mendanai rencana tersebut. Fase penganggaran merupakan fase yang sangat penting. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja sebenarnya dapat menggagalkan program-program yang telah ditulis sebelumnya. Dalam banyak kasus, seperti yang Anda lihat, penyusunan anggaran tampaknya menjadi bagian yang terpisah dari perumusan dan perencanaan strategis, sehingga keberhasilan pelaksanaan anggaran sejalan dengan keberhasilan program atau tujuan organisasi. steker. Pengangguran tersebut tidak

dapat menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi.

Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur sebagai instansi pemerintah yang melayani masyarakat membutuhkan strategi dalam mengelola aspek keuangannya. Anggaran adalah salah satu strategi yang bisa Anda gunakan. Hal ini dikarenakan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memungkinkan Kantor Wilayah Jawa Timur untuk merencanakan alokasi dana yang diperlukan dalam jangka pendek, melakukan pengelolaan keuangan, dan menggunakan dana tersebut. Apabila terdapat selisih antara anggaran belanja dan pelaksanaannya, dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penyusunan anggaran tahun depan.

Pengelolaan keuangan sangat penting di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur, agar semua kebutuhan program dan anggaran yang ditetapkan untuk mendanai pelaksanaannya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Penganggaran tidak terlepas dari biaya yang terkait dengan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur. Semua program membutuhkan dana untuk mendukung program Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur. Oleh karena itu, untuk membuat anggaran yang memenuhi persyaratan tersebut, Anda perlu mengalokasikan biaya yang tepat.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui dan memahami Langkah-langkah ataupun proses penyusunan anggaran dan bagaimana proses realisasi anggaran itu di realisasikan.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Penelitian ini bermanfaat untuk dapat mengetahui bagaimana mekanisme penyusunan anggaran dan manfaat dari penelitian ini juga dapat mengetahui realisasi anggaran di AHU KEMENKUMHAM.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Pembatasan dalam suatu permasalahan bertujuan agar lebih fokus pada pokok pembahasan guna menghindari terjadinya perluasan makna, serta tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas. Adapun batasan yang dimaksud yaitu dengan suatu objek penelitian hanya dilakukan pada AHU Kementrian Hukum dan Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur dan batasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini hanya fokus pada Mekanisme penyusunan anggaran dan realisasi anggaran pada AHU Kementrian Hukum dan Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur..

1.5 Metode Pengumpulan Data

Pada hal ini, perlu diperhatikan lebih seksama supaya penelitian penulis harus benar-benar memperoleh data maupun informasi akurat yang akan digunakan dalam penelitiannya. Untuk mendapatkan data maupun informasi, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data berupa:

1. Observasi

Metode pengumpulan data lewat penelitian ataupun terjun langsung ke dalam kegiatan tersebut. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai suatu peristiwa ataupun kejadian.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang tidak lain adalah pegawai bagian AHU Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur guna memperoleh data yang akurat terhadap mekanisme penyusunan anggaran dan realisasi anggaran.



